

## PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PAJAK DAERAH DAN JUMLAH PERUSAHAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NDUGA TAHUN 2009 -2018

Utlum Nimiange<sup>1</sup>, Daisy S. M. Engka<sup>2</sup> dan George M. V. Kawung<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: [1nimiange567@gmail.com](mailto:nimiange567@gmail.com)

### ABSTRAK

Pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih profesional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Nduga Papua pada tahun 2004-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Untuk mendapatkan hasil yang baik maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama penelitian dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0.984, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sebesar 98.4%, sedangkan sisanya 1.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Kata kunci:** Pendapatan asli daerah, Pendapatan perkapita, Jumlah perusahaan dan Jumlah penduduk

### ABSTRACT

Local revenue is expected to be able to provide a substantial contribution to the Regional Revenue and Expenditure Budget. Therefore, local revenue must be managed in a more professional manner and is expected to support economic improvement efforts, become a source of financing for government and development. per capita income, the number of companies and the number of population towards the receipt of local revenue in the Papua district in 2004-2015. The analytical tool used is multiple linear regression with a significance level of 5% for each statistical test. To get good results then test all classic assumptions fulfilled. This research has shown that the independent variables jointly research and partial have a significant influence on the independent variables. The research hypothesis shows that the income per capita variable has a positive and statistically significant effect, the variable population has a negative and statistically significant effect, the variable number of companies does not have a statistically significant effect on regional own-source revenue. The coefficient of double determination ( $R^2$ ) was obtained for 0.984, meaning that the model used in this study showed that the independent variable was only able to explain the independent variable by 98.4%, while the remaining 1.6% was explained by other variables outside this research model.

**Keywords :** original regional income, income per capita, number of companies and total population

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah melalui oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah otonomi dalam hal ini terutama dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan dirasa masih kurang. Kenyataan ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk PAD kabupaten/kota. Permasalahan yang sama juga dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Nduga Pa pua dalam hal ini peningkatan pembiayaan keuangandaerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, untuk itu penelitian kali ini dilaksanakan di Kabupaten Nduga Papua dengan fokus penelitian tentang pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap PAD dengan menggunakan data sekunder periode penelitian 2009-2018, sehubungan dengan hal tersebut maka ada baiknya berikut ini dipaparkan gambaran makro ekonomi mengenai kebijakan keuangan.

Tabel 1.  
Sumber-sumber Penerimaan PAD Kabupaten Nduga

Ta- hun	Realisasi PAD	Sumber-sumber PAD							
		Pajak Daerah	%	Retri- busi Daerah	%	Laba BUMD & Aset Daerah	%	Lain-lain PAD yang sah	%
2010	9.244	806	8.70%	6.597	71.40%	801	8.70%	1.041	11.30%
2011	12	2.87	23.90%	6.369	53,1%	1.2	10.00%	1861	13.00%
2012	14.572	4.589	31.50%	6.201	42.60%	2.108	14.50%	1.673	11.50%
2013	20.31	6.664	32.80%	2.64	13.00%	2.64	13.00%	1.725	8.50%
2014	18.092	5.676	31.40%	2.913	16.10%	2.913	16.10%	2.345	13.00%
2015	74.218	825.799	128.30%	24.72	143.10%	809.861	62.30%	1867.784	57.30%
2016	148.436	1651.598	256.60%	49.44	286.20%	1619.722	124.60%	3135.568	114.60%
2017	210.59267	2473.613	363.97%	72.218	418.57%	2427.641	176.17%	4801.7887	163.23%
2018	275.76467	3296.574	476.57%	95.4815	553.62%	3236.0455	230.42%	6368.4002	214.03%

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Nduga (dalam jutaan rupiah), 2009-2018

Tabel 1 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2018 daripajak daerah sebesar 8.7% 32.8% retribusi daerah sebesar 13.0% - 71.4%, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8.7% - 16.1%, lain-lain PAD yang sah sebesar 8.5% -13%. Bahwa selama periode 7 (Tujuh) tahun, anggaran Kabupaten Nduga Papua realisasi penerimaan pendapatan asli daerah cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah ini akibat dari perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nduga Papua yang berkembang pesat. Ini dikarenakan semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dimana ini memberikan kontribusi kepada pajak dan retribusi.

### Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap PAD di Kabupaten Nduga.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Nduga.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap PAD di Kabupaten Nduga.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah pajak daerah dan jumlah

- perusahaan terhadap PAD secara stimulasi.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

## Tinjauan Pustaka

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari ; Setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juctio Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, *law enforcement* pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan, sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan penerimaan bagian atau laba atas penyertaan modal dan investasi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : a) Hasil pajak daerah; b) Hasil Retribusi daerah; c) Hasil perusahaan milik daerah; d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud Nilai Tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari Nilai Produksi (*Output*) di kurangi Biaya Antara (BA). Dengan formulasi sebagai berikut :  $NTB = \text{Nilai produksi (output)} - \text{biaya antara}$ .

### Jumlah Penduduk

Adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik region (daerah) kabupaten Nduga Papua. Kecuali (i) Wisatawan asing (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Winus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan yang bertujuan tidak menetap (ii) Awal dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luarregion yang sedang masuk dok atau singgah di daerah region tersebut; (iii) Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan; (iv) Anggota Korps Diplomat, Konsulat, yang di tempatkan di wilayah domestik daerah tersebut; (v) Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai pekerja musiman saja; (vi) Pegawai Badan Internasional/Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan. Orang-orang tersebut diatas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.(PDRB KabupatenNduga Papua 2003, 11).

### Jumlah Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis merupakan satu komponen yang penting dari perencanaan perekonomian daerah. Paling tidak ada sepuluh helemen dasar atau teknik dasar yang secara normal dari pengembangan pusat bisnis, yakni :

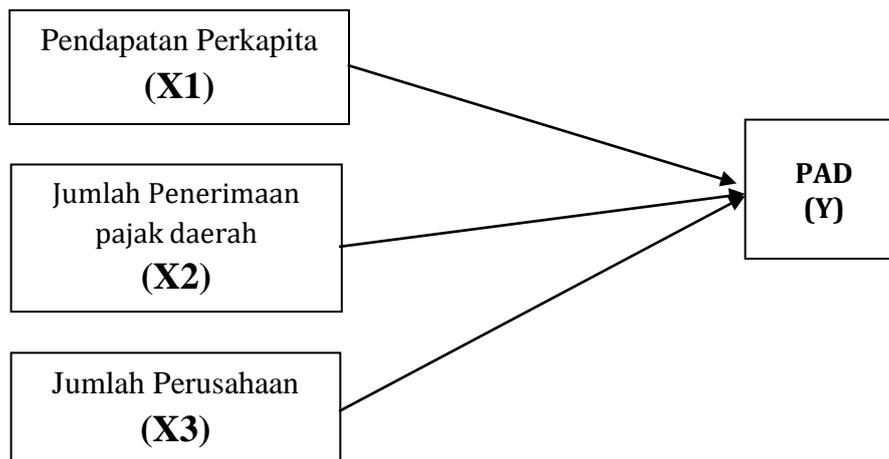
- 1) Pusat bantuan bagi usaha kecil, untuk menyediakan : (i) training manajemen; (ii) konsultasi; (iii) jasa penelitian untuk meningkatkan performance-nya dan (iv) membantu memperluas penyerapan angkatan kerja.
- 2) Pusat teknologi dan bisnis.
- 3) Sistem pemasaran secara kelompok. Faktor-faktor utama yang mendorong berdirinya operasi kelompok pemasaran adalah : (i) terbatasnya skala produksi; (ii) adanya distribusi dan pemasaran dalam skala besar; (iii) kebutuhan *survive* dari ancaman luar (*penetrasi impor*) dan (iv) sikap yang baik melalui kolaborasi.
- 4) Perusahaan pembiayaan ventura.
- 5) Pusat informasi bisnis.

- 6) Program pengembangan dan kepariwisataan. Pada dasarnya kita mengenal tiga tipe wilayah berkaitan dengan sektor pariwisatanya, yakni : (i) Daerah dimana sektor pariwisata relatif kecil; (ii) Daerah dimana secara nyata mempunyai potensi wisata tinggi dan (iii) Daerah dengan potensi wisatasedang/cukup.
- 7) Penelitian dan pengembangan.
- 8) Pusat-pusat inkubasi.
- 9) *Enterprise zone*.
- 10) *Enterprenuer development activities*.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Riduansyah (2000), dengan judul "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan aslidaerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah" (Studi kasus pemerintah daerah kota Bogor), dengan tujuan untuk menjelaskan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan menggambarkan kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bogor, dengan metode *descriptive exploratory*, dengan hasil kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap APBD tahun 1994-2000 berkisar 7.07% - 8.79% dengan kontribusi per tahun 7.81%. Untuk komponen retribusi daerah terhadap APBD berkisar 8.36% -23.05% dengan kontribusi pertahun.

**Model Penelitian**



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

**2. METODE PENELITIAN**

**Data dan Sumber Data**

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data dasar BPS dan DPPKAD Kabupaten Nduga Papua. Dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penggalan data berdasarkan data sekunder dan pada waktu berurutan (*times serries*) tahun 209-2018 selanjutnya di lakukan pengujian atas data. Metode analisis data menggunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik untuk memperoleh fungsi linier yang terbaik dan parameter tidak bias.

**Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS *for Windows ver.16* dengan tingkat kemaknaan untuk menolak hipotesis nol adalah  $< 0,05$  untuk setiap uji statistik. Langkah-langkah regresi linier berganda yang dilakukan.

**3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik  
Uji Autokorelasi**

<b>Durbin-Watson</b>
1.632

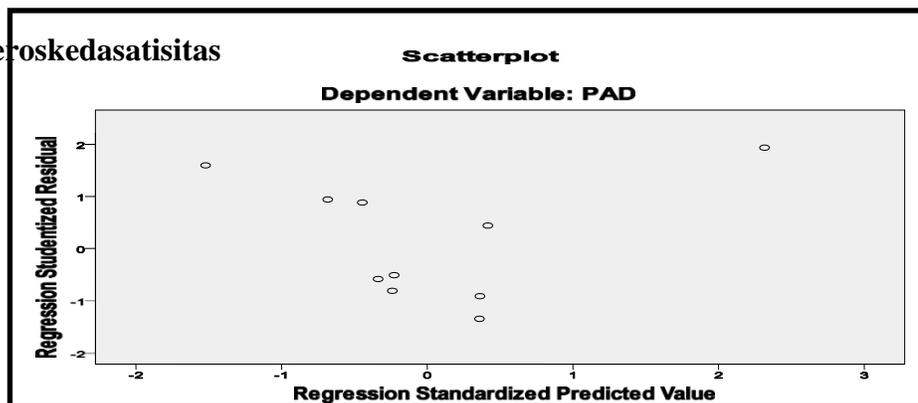
Hasil uji autokorelasi terhadap variabel-variabel penelitian ini menunjukkan angka Durbin Watson sebesar (DW) 1,477. Karena nilai DW adalah  $-2 < 1,632 < 2$  maka tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan Per Kapita	0.757	1.322
jumlahPenerimaan pajak daerah	9073.383	1322.24
	0.960	1.042

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penerimaan pajak daerah dan Jumlah perusahaan adalah lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas didalam variabel penelitian ini.

**Uji Heteroskedasitisitas**



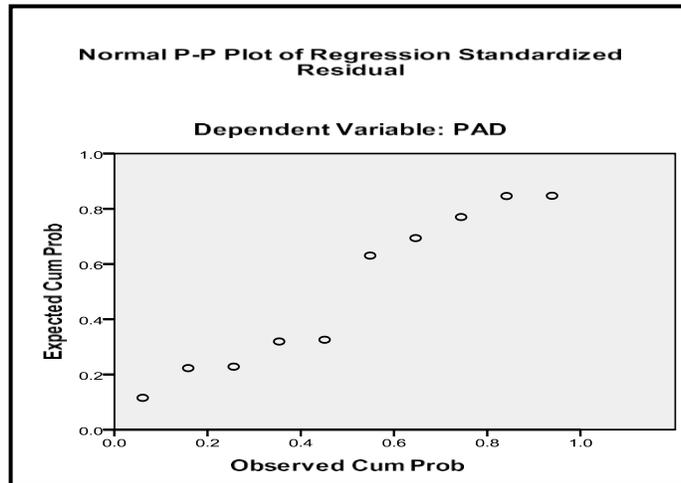
Hasil uji Heteroskedastisitas memperlihatkan sebaran plot dalam scatterplot tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang rapi dan teratur. Oleh karena itu berdasarkan hal ini maka di dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
Indikator		PAD	Pendapatan Perkapita	Jumlah Penerimaan Pajak daerah	Jumlah Perusahaan
N		10	10	10	10
Normal Parameters	Mean	27.3450	16.5280	11.8070	5.2270
	Std. Deviation	.11588	.19217	.02359	.35242
Most Extreme Differences	Absolute	.283	.113	.164	.258
	Positive	.283	.113	.164	.258
	Negative	-.232	-.101	-.135	-.155
Kolmogorov-Smirnov Z		.894	.359	.520	.817
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		<b>.401</b>	<b>1.000</b>	<b>.950</b>	<b>.517</b>

Hasil uji

normalitas data menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel bebas Pendapatan Per Kapita adalah 1,000 variabel Jumlah Perusahaan sebesar 0,517 dan variabel terikat PAD sebesar 0,041. Oleh karena ketiga variabel bebas memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tersebar secara normal. Selain menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov maka uji normalitas data dalam penelitian ini juga diuji dengan uji PP-Plot of Regression Standardized Residual dari data penelitian. Hasilnya adalah sebagai berikut :



Garis regresi dan menyebar teratur tidak menjauh dari garis regresi. Hal ini menunjukkan Berdasarkan hasil uji PP Plot maka dapat dilihat sebaran residu dari data penelitian berada disekitaran bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebar secara normal.

**Persamaan Regresi dan Pengaruh Secara Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	-7.200	12.130		-.594
Pendapatan Per Kapita	.188	.136	.312	1.385
Jumlah Penerimaan pajak daerah	9073.38	1322.24	3296.574	476.57
Jumlah Perusahaan	3	.066	.355	1.775

Persamaan Regresi  $Y = -7,2 + 0,188X_1 + 117X_3$ . Interpretasi daripersamaan regresi ini adalah sebagai berikut :

- Jika variabel bebas Pendapatan Per Kapita (X1), Jumlah Penerimaan pajakdaerah (X2) dan jumlah perusahaan adalah nol maka PAD bernilai - 7,2.
- Jika pendapatan per kapita meningkat sebesar 1 % maka PAD juga akanmeningkat sebesar 0,188 %.
- Jika jumlah perusahaan bertambah sebesar 1 % maka PAD juga akanmeningkat sebesar 2,661 % .

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri dapat dilihat dalam nilai uji  $t_{hitung}$  kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Hasil adalah sebagai berikut :

- $t_{hitung}$  untuk variabel pendapatan per kapita = 1,385 sedangkan t tabel ( $\alpha_{0,05/2 ; 10-3}$  menjadi  $\alpha 0,025 ; 7$ ) memiliki nilai t tabel sebesar : 2,365. Hasil ini menunjukkan bahwa t tabel (2,365) >  $t_{hitung}$

(1,385), dengan demikian maka variabel pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

- $t_{hitung}$  untuk variabel jumlah penerimaan pajak daerah = 9073.383 sedangkan  $t$  tabel ( $\alpha_{0,05/2} ; 10-3$  menjadi  $\alpha_{0,025} ; 7$ ) memiliki nilai  $t$  tabel sebesar : 2,365. Hasil ini menunjukkan bahwa  $t$  tabel (2,365) >  $t_{hitung}$  (476.57), dengan demikian maka variabel penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.
- $t_{hitung}$  untuk variabel jumlah perusahaan = 1,775 sedangkan  $t$  tabel ( $\alpha_{0,05/2} ; 10-3$  menjadi  $\alpha_{0,025} ; 7$ ) memiliki nilai  $t$  tabel sebesar : 2,365. Hasil ini menunjukkan bahwa  $t$  tabel (2,365) >  $t_{hitung}$  (1,385), dengan demikian maka variabel jumlah perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

**Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel secara Bersama-sama atau Simultan**

Pengaruh variabel pendapatan per kapita, jumlah penerimaan pajak daerah, dan jumlah perusahaan terhadap PAD kabupaten Nduga dapat dilihat dalam hasil uji  $F_{hitung}$  kemudian dibandingkan dengan nilai  $F$  tabel. Hasilnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 6,705
- ❖ Nilai  $F$  tabel untuk 3 variabel bebas ( $k=3$ ) dengan  $n-k$  (10-3) atau 3 variabel bebas dan  $n = 7$  adalah 4,35

Nilai  $F_{hitung}(6,705) >$  Nilai  $F$  tabel (4,35), dengan demikian maka secara bersama-sama atau simultan maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

**Korelasi Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Terikat**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 <sup>a</sup>	.770	.655	.06803

Hasil uji R menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara 3 variabel bebas dalam penelitian ini dengan variabel terikat adalah sebesar 87,8 %. Hal ini berarti bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang erat dan kuat yang bersifat positif.

**Kontribusi Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat**

Kontribusi atau determinasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam uji determinan (R Square atau  $R^2$ ). Hasil yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,770 atau 77 %. Hal ini berarti bahwa kontribusi pendapatan per kapita, jumlah penerimaan pajak daerah, dan jumlah perusahaan terhadap perkembangan PAD Kabupaten Nduga adalah sebesar 77% sedangkan sisanya sebesar 23% disumbangkan oleh variabel yang lain.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan per kapita, jumlah penerimaan pajak daerah, dan jumlah perusahaan tidak memiliki pengaruh, baik secara sendiri-sendiri ataupun parsial maupun secara bersama-sama atau simultan terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

##### Saran

Pemerintah Kabupaten Nduga perlu memperhatikan kondisi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan kualitas pendapatan per kapita, keberadaan perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Nduga dan kualitas kehidupan penduduk sebab ketiga variabel ini sesungguhnya memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan membayar kewajiban terhadap negara dalam hal ini terhadap pemerintah Kabupaten Nduga yang berhubungan dengan peningkatan PAD. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajiban pajak maupun retribusi daerahnya. Karena hasil dari komponen pendapatan asli daerah tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti jumlah perusahaan daerah. Sehingga dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi berarti masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun daerahnya. Bagi Pemerintah Nduga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan dari masing-masing komponen pendapatan asli daerah terutama penerimaan pajak daerah dan jumlah perusahaan, dengan cara meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan jumlah penerimaan pajak daerah dan jumlah perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick.al. 1989.(Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hakki, D. 2008. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor [skripsi]*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*: Penerbit Bunga Rampai.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Kuncoro, Haryo.2007. *Fenomena Flaypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*.
- Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9. No. 1. Hal 47-63. Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyanto. 2002. "Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosaren Propinsi Jawa Tengah (The Potential of Local Government Revenue : A Case Study in Subosuka Wonosaren District, Central Java Provinces)". *Economics Faculty* Sebelas Maret University.Surakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah." *Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah"* yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung.
- Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. Badan Pusat Statistik (BPS).

Sulawesi Utara Dalam Angka. Berbagai edisi penerbitan, BPS, Sulut Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado

*NO. 1. HAL 39-53. UU No. 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah. UU No. 28*

*Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.*

*UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta